

**“CIREBON BARU”:
Pembentukan Simbol dan Identitas Perkotaan Cirebon, 1946-1962**

Dhanang Respati Puguh
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji pembentukan simbol dan identitas kota Cirebon selama periode 1946-1962. Pembahasan difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu: perkembangan pembentukan simbol dan identitas kota Cirebon, pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan untuk memantapkan simbol dan identitas Cirebon, dan pemaknaan terhadap simbol dan identitas kota Cirebon. Makalah ini disusun dengan menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan sumber arsip, koran, majalah, foto, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan studi ini, serta sumber lisan melalui kegiatan sejarah lisan.

Pada masa kolonial Belanda kota Cirebon dicitrakan sebagai kota kolonial, sehingga pembangunan kota ini lebih dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan orang-orang Belanda. Pencitraan ini menemukan acuannya pada pengetahuan dan pengalaman mereka tentang kota-kota di Eropa yang teratur, bersih, indah, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan warga kota seperti ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, dan perumahan. Keberhasilan mengubah wajah kota Cirebon yang pada beberapa abad lalu digambarkan sebagai kota yang dilecehkan disimbolisasikan dalam lambang *Gemeente* Cirebon melalui semboyan “*per aspera ad astra*” (dari duri onak dan lumpur menjadi bintang).

Namun demikian, sejak 1930-an muncul pencitraan yang berbeda terhadap kota Cirebon yang lahir dari pengalaman keseharian warga bumiputera Cirebon. Dalam pandangan mereka, Cirebon di bawah *gemeente* merupakan sebuah kota yang tidak menyenangkan. Keadaan fisik kota yang buruk dan kenyataan bahwa penduduk bumiputera tidak dapat menikmati fasilitas kota sebagaimana halnya orang-orang Belanda menjadi dasar pembentukan citra tentang kegagalan *gemeente* dalam membangun kota Cirebon. Sejak tahun 1930-an sampai kekuasaan pemerintah kolonial Belanda berakhir, *Gemeente* Cirebon tidak melakukan penataan fisik kota. Selain berkaitan dengan menurunnya kepercayaan rakyat kepada *Gemeente* Cirebon, hal itu juga disebabkan oleh krisis *malaise* yang melanda Hindia Belanda.

Kritik terhadap *Gemeente* Cirebon yang dianggap mengabaikan hak-hak rakyat, karena tidak mampu membangun kota dan menyediakan fasilitas bagi warga kota sebagaimana yang diharapkan penduduk bumiputera, menjadi landasan untuk mengembangkan simbol dan identitas kota Cirebon pada masa kemerdekaan. Simbol dan identitas kota mengacu pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui simbol itu warga kota Cirebon menyatakan dirinya sebagai manusia baru, yakni manusia yang mempunyai kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang telah merdeka. Hal itu

dikonsepsikan sebagai “Cirebon Baru” yang ditujukan untuk membawa Cirebon pada tempat yang terhormat di mata Republik Indonesia.

“Cirebon Baru” diwujudkan dengan membangun citra Cirebon sebagai kota *republikein*. Simbolisasi kota *republikein* dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan penting pada masa revolusi, yang kemudian menjadi kelompok dominan, dengan mendayagunakan ruang publik. Penamaan jalan-jalan di kota Cirebon dengan menggunakan nama-nama pahlawan nasional dan lokal dan pendirian Tugu Proklamasi di perempatan jalan sebagai simbol keindonesiaan menunjukkan bahwa gagasan tentang kemerdekaan Indonesia harus menjadi milik publik dan dijadikan sebagai bagian dari ingatan kolektif warga kota Cirebon. Hal itu juga memperlihatkan bahwa ruang publik telah diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang pemanfaatannya ditentukan oleh cara kelompok yang dominan, dalam hal ini adalah tentara dan pejuang kemerdekaan, dalam mendefinisikan masa lalu sebagai basis pembentukan identitas Cirebon pascakolonial.

Konsepsi “Cirebon Baru” juga dijabarkan ke dalam pembangunan dalam berbagai bidang yang mengacu pada kebutuhan mendasar rakyat yang pada masa kolonial kurang mendapatkan perhatian dari *Gemeente* Cirebon. Konsepsi tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah Kotapraja Cirebon melalui program pembangunan baik dalam bentuk penataan fisik kota, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan warga kota, maupun pengembangan sikap dan mental untuk membedakan warga kota Cirebon pascakolonial dari masa sebelumnya. Penataan fisik kota dilakukan dengan membangun jembatan dan jalan dan melengkapinya dengan lampu penerangan jalan untuk menciptakan kesemarakota. Pemerintah juga membangun berbagai fasilitas untuk menyelenggarakan layanan publik dalam bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan sosial kaum miskin, dan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Simbol dan identitas kota Cirebon pascakolonial sebagai hasil penjabaran “Cirebon Baru” kemudian ditegaskan dalam lambang Kotapraja Cirebon sebagai simbol yang paling kuat.

“‘Cirebon Baru’: Pembentukan Simbol dan Identitas Perkotaan Cirebon, 1946-1962”. Paper, Seminar on Street Images: Decolonization and Changing Symbolism of Indonesian Urban Culture Between 1930s and Early 1960s. Nederland Instituut voor Oorlog Documentatie – Pusat Studi Sosial Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 8-9 Agustus 2005.